

Tinjauan Filosofis; Konsekuensialisme Hubungan Internasional dalam Fenomena Pembatalan Pembelian Kapal Selam oleh Australia dan Prancis berdasarkan Perjanjian Trilateral AUKUS

Utriya Amanda¹

TransBorders^{*}

Abstract

This paper uses the philosophical reflection approach of consequentialism with the support of securitization theory to look at the specific phenomenon of Australia's cancellation of submarine purchases from France under the AUKUS trilateral agreement. The focus of this paper highlights how Australia's decision is viewed from the perspective of consequentialism, which assesses actions based on their consequences. The journal uses a qualitative method with a literature study as the source of literature. The results of writing on this case are considered important because they show how national security and geopolitical considerations influence state decisions in the context of international relations. Australia's considerations and the impacts that must be faced return to the interest of maintaining the stability of the Indo-Pacific region through strategic policies despite having to face the degradation of diplomatic relations with France as a form of consequence and responsibility through the payment of fines.

Keywords: *Australia; AUKUS; France; Sumbarine*

Abstrak

Penulisan ini menggunakan pendekatan refleksi filosofis konsekuensialisme dengan dukungan teori sekuritisasi untuk melihat fenomena khususnya dalam pembatalan pembelian kapal selam oleh Australia dari Prancis berdasarkan perjanjian trilateral AUKUS. Fokus penulisan ini menyoroti bagaimana keputusan Australia dipandang dari sudut pandang konsekuensialisme, yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Penulisan jurnal menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber literatur. Hasil penulisan pada kasus ini dianggap penting karena menunjukkan bagaimana pertimbangan keamanan nasional dan geopolitik mempengaruhi keputusan negara dalam konteks hubungan internasional. Pertimbangan Australia beserta dampak yang harus dihadapi kembali kepada kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan strategis walaupun harus menghadapi degradasi hubungan diplomasi bersama Prancis sebagai bentuk konsekuensi dan tanggung jawab melalui pembayaran denda.

Kata kunci: *Australia; AUKUS; Kapal Selam; Prancis*

¹ Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada

^{*} Jurnal Hubungan Internasional Fisip UNPAS

Email: trans'borders@unpas.ac.id

Latar Belakang

Australia sebagai negara yang berada di Indo-Pasifik selayaknya negara-negara dunia lainnya memiliki *concern* lebih terhadap pertahanan negaranya. Menimbang kondisi pertahanan dunia yang tidak stabil dengan segala isu-isu yang harus dihadapi dewasa ini, terutama isu sekuritas pada keamanan maritime global. Selain isu politik antar negara isu-isu soal keamanan terutama maritim menjadi sektor pokok yang disiapkan oleh masing-masing negara didunia terlebih dengan berbagai persoalan domestik yang harus diselesaikan. Keberadaan Australia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia serta menjadi negara strategis dalam kawasan Asia-Pasifik. Asia-Pasifik merupakan kawasan yang memiliki potensial konflik tinggi juga menumbuhkan ketegangan keamanan negara-negara bagiannya. Prediksi atas potensi ketegangan wilayah tersebut memberikan dampak signifikan bagi kedaulatan Australia yang disebabkan oleh isu-isu mengenai Laut China Selatan, keberadaan supremasi Amerika Serikat dan China dewasa ini².

Potensi ketegangan geopolitik kawasan tidak terlepas dengan keberadaan China berdasarkan klaim terhadap LCS yang menghasilkan probabilitas perang terbuka bagi negara-negara yang berkaitan. Tidak hanya beberapa negara diatas tetapi keberadaan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam memiliki klaim atas sebagian wilayah LCS. China sendiri memiliki geostrategi dalam klaim LCS guna memaksimalkan kepentingannya dikawasan tersebut tidak hanya menyoroti dari aspek geografis tetapi kondisi politik internasional yang memberikan keuntungan dari beberapa sektor untuk

China. Beberapa alasan menjadikan ketegangan geopolitik hingga saat ini menyebabkan determinasi tinggi terhadap *concern* sekuritas bagi negara-negara dunia karena akar persoalan yang sudah kompleks³. Karena tendensi persoalan tersebut telah menyangkut beberapa negara tertera bahkan tendensi super power pasca perang dingin dengan keberadaan AS menjadi sumber polemik ketegangan kawasan, termasuk Australia.

Posisi Australia dalam ketegangan geopolitik LCS memberikan kedaulatan negaranya dengan memaksimalkan pertahanan negaranya guna menciptakan stabilitas kawasan salah satu keputusan yang dilakukan oleh Australia ialah dengan bergabung bersama pakta pertahanan trilateral bersama AS dan Inggris. AUKUS (*Australia, United Kingdom, United States*) merupakan akronim pakta pertahanan trilateral yang diumumkan oleh Menteri Pertahanan Australia di akhir tahun 2021. AUKUS memiliki tujuan dalam membangun stabilitas dan keamanan kolektif yang dilatar belakangi oleh konflik LCS sehingga memunculkan ketegangan kawasan⁴. Kemitraan strategis yang berfokus terhadap keamanan terlebih dikawasan Indo-Pasifik, pakta trilateral AUKUS memiliki dua pilar terhdap akuisisi dan pengembangan kapal selam bertenaga konvensional untuk Angkatan Laut Australia dan yang kedua, untuk menyerukan kolaborasi dalam penggunaan pembagian teknologi dan informasi.

Jauh sebelum digagasnya kerjasama pertahanan melalui AUKUS, hubungan dalam bidang pertahanan oleh Australia, AS, dan Inggris sudah lama dijalin melalui perjanjian dan kerjasama militer secara umum. Mengingat kembali puncak ketegangan geopolitik di LCS semakin

² Yoga Suharman, 'Dilema Keamanan Dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan', *Intermestic: Journal of International Studies*, 3.2 (2019), 127
<<https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>>.

³ Ibid,

⁴ Lailatul Mubarakah Naeli, 'KEBIJAKAN AUSTRALIA MEMBELI KAPAL SELAM PERANCIS DALAM PROYEK SEA 1000 : AUSTRALIAN FUTURE SUBMARINES PROGRAM', 2018.

memanas kesadaran Australia dimulai pada tahun 2020, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mendeklarasikan akan niat serta kebutuhan untuk mengembangkan kapal selam milik Angkatan Laut Australia. Ditahun-tahun berikutnya penguatan kerjasama dan dukungan dari AS terhadap Australia semakin meningkat. Agustus tahun 2021 pada akhirnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan bahwa Australia akan membatalkan kontrak senilai \$66 miliar AUD dengan Prancis untuk pengadaan kapal selam kelas Barracuda dan menggantinya dengan pengembangan kapal selam nuklir bersama AS dan Inggris⁵.

Kronologi pembatalan pembelian kapal selam yang dilakukan Australia kepada Prancis menjadi sorotan terhadap penulisan ini. Sebab fenomena tersebut selain menghasilkan keputusan yang mempengaruhi hubungan kedua negara juga memberikan tendensi eksternal bagi negara dunia lainnya untuk menyikapi hal tersebut terlebih keputusan Australia bergabung dengan AUKUS di tahun 2021 yang menuai berbagai respon dalam berbagai sektor. Fenomena pembatalan pembelian kapal selam oleh Australia memberikan gambaran pertimbangan konsekuensial terhadap tindakan yang dilakukannya. Menariknya, tindakan sebuah negara memiliki tolak ukur moralitas dalam mempertimbangkan dampak sebagai konsekuensi dari tindakannya. Pada dasarnya sebuah kepatuhan terhadap perjanjian yang sudah dibangun harus dilaksanakan sebagaimana semestinya tetapi, pada fenomena pembatalan pembelian kapal selam oleh Australia dengan Prancis justru tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang dimuat sebagai dampak pembatalan

tersebut. Dari berbagai alasan dan pertimbangan secara tertutup tulisan ini hendaknya memberi kontribusi prespektif baru dalam kajian hubungan internasional melalui sudut pandang konsekuensialisme nilai. Urgensi terhadap sekuritas kawasan telah menjadi tanggung jawab negara-negara dunia untuk membangun stabilitas kawasan. Kesadaran atas kedaulatan dan tanggung jawab merupakan bagian dari negara yang perlu dipertimbangkan serta menjadi faktor determinan dalam melakukan tindakan. Hal ini bisa menjadi sebuah tolak ukur bagi Australia bersama kepentingannya untuk membatalkan perjanjian pembelian kapal selam dengan Prancis dan beralih membangun proyek kapal selam bertenaga nuklir bersama AS dan Inggris.

Beberapa kajian literatur terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap berbagai sudut pandang kerjasama hubungan kerjasama luar negeri, konsep-konsep pertahanan negara, studi strategi dan yang lainnya. Akumulasi multi prespektif tersebut dapat menjadi kajian penulis untuk melanjutkan penulisan penelitian ini dari refleksi filosofis cabang aksiologi melalui konsep konsekuensialisme sebagai pisau analisa tindakan Australia kepada Prancis.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai sumber literatur. Studi kepustakaan yang menjadi sumber literatur kepenulisan berupa buku, berita, jurnal, *standing statement*, laporan atau sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak terkait. Maka data informasi yang didapatkan mengenai penulisan fenomena pembatalan pembelian kapal selam Australia dengan Prancis serta keterkaitan Australia dengan AUKUS akan diolah dengan teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. Sehingga, metode tersebut dapat mengolah data serta

⁵ 'Australia Join AS Di LCS, Dendam Kesumat Apa Ke China?' <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200729141434-4-176270/australia-join-as-di-lcs-dendam-kesumat-apa-ke-china>> [accessed 5 December 2023].

memberikan pemahaman alur logika logis hingga menghasilkan kesimpulan penulisan.

Teori Konsep

Konsekuensialisme

Pendekatan konsekuensialisme kadang dipahami tidak menjadi konsep monolitik tunggal yang memberikan pengertian secara harfiah saja tetapi lebih kompleks dan luas dalam pengaplikasiannya. Melalui tinjauan aksiologi, konsekuensialisme dalam aksiologi mengacu pada pendekatan dalam etika yang menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau akibat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Dalam konteks aksiologi, konsekuensialisme mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan serta dampak-dampaknya terhadap individu, masyarakat, atau dunia secara keseluruhan.

Dapat dikatakan bahwasanya konsekuensialisme menjadi pendekatan yang menyoroti akan sebuah tanggung jawab dari tindakan, memuat evaluasi terhadap konsekuensi serta dampak dalam keadaan tertentu dan bukan menjadi doktrin moral yang absolut. Kontribusi ide yang memuat banyak interpretasi-interpretasi serta aplikasi dapat dikatakan sebagai pendekatan konsekuensialisme. Secara sederhana pendekatan konsekuensialisme sendiri berfokus untuk mengembangkan dampak-dampak akan sebuah tindakan yang menjadi keputusan aktor diawal, sehingga pertimbangan dampak akan tindakan tersebut menjadi kalkulasi serta prediksi sebelum melakukan sebuah tindakan. Bagi para pemikir yang memiliki kecondongan terhadap pendekatan konsekuensialisme seperti Singer, Parfit, Norcross, dan Kagan, berargumen bahwa tindakan aktor

terkait tidak mengizinkan tindakan yang luar biasa dengan dampak-dampak yang dibawa akan merujuk pada kompleksitas lebih lanjut. Adanya pemicu sebuah aktor untuk melakukan sebuah tindakan juga menjadi poin dalam pendekatan konsekuensialisme, bagi mereka para pemikir konsekuensialisme memahami sebuah kondisi yang memicu tindakan aktor dalam melakukan suatu tindakan menjadi dasar polemik⁶.

Tindakan yang dimaksudkan ialah tindakan kolektif yang menjadi pemicu sebuah aktor mulai meninjau kembali dampak konsekuennya dalam melakukan sebuah tindakan. Sebagai hasil dari tindakan tersebut memberikan nilai maksimal atas bentuk menguntungkan bahkan nilai-nilai kebaikan. Disatu sisi lainnya, pemicu melalui tindakan kolektif merupakan kebutuhan akan respon aktor-aktor terkait sebab respon sebuah situasi akan lebih baik jika aktor mengambil langkah untuk bertindak dibandingkan hanya sedikit bahkan tidak ada yang melakukannya. Skenario atas tindakan aktor dan kalkulasi konsekuensi sendiri merupakan tindakan yang tidak dapat diperhitungkan secara absolut, tetapi jika mengamati proses dalam tindakan tersebut akan memberikan kerangka pandangan untuk menganalisa sebuah fenomena. Sedangkan, pendekatan konsekuensialisme mengabaikan aspek-aspek intrinsik tindakan itu sendiri, seperti kewajiban moral atau aturan yang harus diikuti, dan lebih fokus pada hasil atau akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan tersebut. Konsekuensialisme berpendapat bahwa tindakan yang menghasilkan akibat yang baik atau menguntungkan secara

⁶ Brian Hedden, 'Consequentialism and Collective Action', *Ethics*, 130.4 (2020), 530–54 <<https://doi.org/10.1086/708535>>.

moral adalah tindakan yang benar atau baik⁷.

Pendekatan ini akan bermakna dan membantu penulis dalam menganalisa lebih jauh tindakan yang dilakukan oleh Australia dengan tanggung jawab atas pembatalan pembelian kapal selam bersama Prancis. Sebagai pandangan filosofis, konsekuensialisme memberikan sudut pandang lain terhadap moralitas dalam membangun kerjasama negara. Negara sebagai aktor dipahami memiliki perhitungan dampak atas tindakannya, dalam studi kasus pembatalan pembelian secara tidak langsung sebagaimana sebuah perjanjian pembelian jika dibatalkan ataupun dilanggar akan merujuk terhadap disharmoni berdasarkan etika normatif. Maka, penulisan ini akan melihat lebih jauh keberadaan aktor negara Australia yang harus mendapatkan dampak atas pelanggaran norma etika kerjasama antar negara dari pendekatan konsekuensialisme.

Teori Sekuritisasi *Copenhagen School*

Selama tiga dekade terakhir polemik keamanan mulai beraneka ragam fokus pendekatan dalam studi keamanan termasuk keberadaan *Copenhagen School* yang digagas oleh Bary Buzan dan Ole Waever. Kerangka teori sekuritisasi yang dikembangkan dalam *Copenhagen School* sendiri berangkat dari pendekatan konstruktivis. *Copenhagen School* melihat keamanan bukanlah sesuatu yang diberikan tetapi sesuatu yang dikonstruksi dan di diskurifu melalui interaksi-interaksi sosial antar subyek. Kerangka sekuritisasi menjadi pendekatan yang menarik di era

kontemporer dengan penolakan terhadap gagasan ontologi materialis dan mengungkap metode filosofis terhadap dinamika fenomena yang terjadi dalam proses isu antar subyek berlangsung. Pendekatan sekuritisasi juga melihat kuasa dan kekuatan aktor-aktor (negara) dapat membingkai ancaman eksistensi dengan mengendalikan melalui gaya linguistik yang sangat berpengaruh terhadap bentuk interaksi yang dibangun.

Sekuritisasi dapat didefinisikan menjadi sebuah isu yang mulanya bukanlah persoalan keamanan dan dikonversi menjadi masalah keamanan. Oleh sebab itu proses pembingkai sebuah persoalan dapat disebut oleh Buzan dan Waever sebagai ancaman eksistensial terhadap entitas yang terkait seperti masyarakat, negara, atau kelompok kolektif tertentu oleh aktor-aktor berpengaruh. Presepsi yang dibentuk dalam rangka sekuritisasi memiliki ketergantungan terhadap cara penyampaian bahasa dan retorika yang digunakan dalam melihat sebuah ancaman eksistensial, maka proses tersebut melibatkan interaksi antar aktor sehingga melahirkan skema fenomena sekuritisasi yang dimaskudkan oleh Bary Buzan dan Ole Waever. Konsepsi sekuritisasi dalam *Copenhagen School* mengaggap isu-isu keamanan tidak selalu menjadi bentuk keamanan secara tradisional, isu di berbagai sektor seperti migrasi, perubahan iklim, kesehatan global, dan ekonomi sehingga keamanan berdasarkan konsepsi sekuritisasi merupakan konsep multidimensional yang cakupannya sangat luas⁸.

⁷ Mozaffar Qizilbash, 'On "Consequentialism" and the Capability Approach', *Journal of Human Development and Capabilities*, 23.2 (2022), 161–81
<<https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1951185>>.

⁸ Maciej Stepka, 'The Copenhagen School and Beyond. A Closer Look at Securitisation Theory', *IMISCOE Research Series*, 2022, 17–31
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-93035-6_2/COVER>.

Ketika sebuah fenomena yang memuat isu tertentu dianggap sebagai masalah keamanan merujuk pada konsep sekuritisasi akan membenarkan penggunaan tindakan darurat atau tindakan luar biasa yang mungkin tidak akan bisa dikategorikan sebagai penanganan “situasi normal”. Hal tersebut akan menghasilkan sebuah tindakan mencakup bentuk-bentuk tertentu seperti pembuatan kebijakan luar negeri yang agresif, pembatasan kebebasan sipil, keputusan ekstrem negara dalam melakukan kerjasama, dan bahkan intervensi militer jika dikehendaki. Sekuritisasi dalam Copenhagen School melihat kemanan melalui lensa konstruksi sosial dan politik dimana kemanan tersebut merupakan konsepsi luas, dinamis, dan subjektif dibangun dalam narasi kebahasaan, diskursus tertentu dan interaksi-interaksi antar aktor internasional⁹.

Hasil Pembahasan

Tinjauan Filosofis Tindakan Pembatalan Perjanjian Australia dan Prancis

Dari sekian banyak tulisan yang menjadi respon analisa atas tindakan Australia terhadap Prancis melalui pembatalan pembelian kapal selam, masih belum adanya kontribusi pandangan filosofis melalui fenomena tersebut. Dalam etika normatif mengacu terhadap standar tindakan yang ‘baik’ secara kultur kebudayaan antar subyek juga memperhitungkan bentuk dampak yang terjadi setelahnya. Kebaikan dan keburukan yang dimuat oleh sebuah tindakan dapat dikalkulasikan melalui prediksi akan masa depan setelah

terjadinya keputusan akan sebuah tindakan tersebut. Pertimbangan akan konsekuensi sebuah tindakan mempengaruhi aktor atau subjek dalam mengambil keputusan mengacu prinsip serta nilai-nilai yang dianutnya.

Kajian yang menyoroti fenomena pembatalan kerjasama proyek kapal selam Australia dan Prancis merujuk pada pendekatan serta konsep hubungan internasional. Mulai dari segi hukum internasional, diplomasi, kajian resolusi konflik, bahkan pendekatan geopolitik mulai membantu menganalisa fenomena ini¹⁰, maka melalui pendekatan-pendekatan tersebut akan mengkonstruksi refleksi filosofis sebagai kontribusi pengetahuan dalam pandangan filsafat nilai.

Pendekatan konsekuensialisme dalam kajian aksiologi juga dapat diterapkan dalam fenomena hubungan internasional. Keputusan Australia pada tahun 2021 untuk membatalkan kontrak pembelian dalam proyek kapal selam bersama Naval Group Prancis menjadi fenomena yang dapat disoroti. Sebelum Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan secara resmi pembatalan tersebut ditelaah melalui perjanjian FSP (*Future Submarine Program*) yang mulanya dapat dioperasikan pada awal tahun 2030 dengan perpanjangan hingga 2050 menuai polemik intrinsik. Sebelumnya pada April 2016, kemenangan tender Naval Group melalui program ToT (*Transfer of Technology*) dengan pemerintah Australia menemukan titik terang dalam kesepakatan kedua pihak tersebut. *Framework agreement* yang disepakati pada akhir tahun 2016 justru

⁹ Barry Buzan and Ole Wæver, ‘Macrosecuritisation and Security Constellations: Reconsidering Scale in Securitisation Theory’, *Review of International Studies*, 35.2 (2009), 253–76 <<https://doi.org/10.1017/S0260210509008511>>.

¹⁰ Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha, ‘Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN’, *Jurnal Lemhannas RI*, 9.4 (2021), 25–42 <<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>>.

mengalami dinamika lebih lanjut dengan pembatalan kontrak ditahun 2021¹¹.

Australia sebagai pihak yang mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kerjasama bersama Naval Group Prancis menelisik lebih jauh konsekuensi yang harus dihadapi negaranya. Pertimbangan konsekuensi yang harus Australia hadapi ialah tantangan hubungan Prancis yang jelas secara sederhana akan memberikan dampak negatif dari keputusan yang diambil oleh Australia. Ada dua kemungkinan spekulatif yang dapat disoroti dari tindakan Australia sebagai konsekuensi secara domestik dan internasional. Konsekuensi dampak domestik yakni adanya kapabilitas serta pembangunan *alutsista* maritim dengan membangun kapal selam bertenaga nuklir bersama AUKUS demi menjaga kedaulatan Australia. Konsekuensi dampak internasional yang didapatkan Australia yang sudah jelas yakni hubungan diplomatik bersama Prancis akan mengalami penurunan dan kemitraan Prancis mengalami dilematis kepercayaan kedepannya setelah pembatal kontraktual tersebut. Dilema etis yang Australia alami berlandaskan terhadap bentuk-bentuk kepentingan nasionalnya di sektor keamanan serta kedaulatan negara.

Selain konsekuensi dampak yakni dengan tumbuhnya respon-respon eksternal atas keputusan yang diambil Australia, adanya respon negara lainnya terutama Prancis sebagai negara yang berhubungan secara langsung dalam membangun proyek kapal selam yang

dibatalkan secara sepihak. Respon secara sederhana dan pasti ialah rasa kekecewaan Prancis, sebagaimana dilansir dalam berita-berita internasional Prancis memutuskan untuk menarik duta besarnya di Australia, AS dan Inggris sebagai seruan respon keputusan Australia¹².

Jika dilakukan pendekatan konsekuensialisme Australia setidaknya telah melakukan perhitungan dan kalkulasi akan keputusan serta tindakannya tersebut. Maka, pasca 2021 Australia telah mengambil langkah diplomatis dengan menjelaskan kepentingan pertahanan nasional dengan melakukan pembangunan proyek kapal selam bersama AS dan Inggris disisi lain Presiden Prancis Emmanuel Macron tetap memandang keputusan Australia sebagai penyebab ketegangan kedua negara. Tanggung jawab Australia dibuktikan dalam pembayaran kompensasi atas pembatalan kesepakatan tersebut dengan membayar 555 Euro setara Rp8,5 triliun sebagai itikad baik Australia¹³. Prancis juga merespon hal tersebut dengan keterbukaan akan proyek lanjutan antara Australia dan Prancis sehingga masih ada kemungkinan kedua negara tersebut melakukan proyeksi kerjasama, tetapi secara realitas masih belum tampak kemungkinan untuk memperbaiki hubungan diplomasi antara kedua belah pihak.

Seyogyanya, jika mengamati konsekuensi yang terjadi sejak awal

¹¹ Lloyd Cox, Danny Cooper, and Brendon O'Connor, 'The AUKUS Umbrella: Australia-US Relations and Strategic Culture in the Shadow of China's Rise', <https://doi.org/10.1177/00207020231195631>, 78.3 (2023), 307–26
<<https://doi.org/10.1177/00207020231195631>>.

¹² 'Gedung Putih: AS "Sesalkan" Penarikan Duta Besar Prancis'
<<https://www.voaindonesia.com/a/gedung-putih-as-sesalkan-penarikan-duta-besar-prancis/6233773.html>> [accessed 5 December 2023].

¹³ 'Australia Announces Compensation Deal with France for Scrapped Submarine Contract'
<<https://www.france24.com/en/asia-pacific/20220611-australia-announces-compensation-deal-with-france-over-scrapped-submarine-contract>> [accessed 5 December 2023].

sebuah perjanjian kerjasama antar negara dengan kesepakatan bersama tidak seharusnya dilanggar. Pelanggaran sebuah perjanjian selain sudah diatur dalam hukum normatif secara kasual juga merupakan tindakan yang merugikan satu sama lain. Tetapi, pada fenomena tertentu hukum tersebut bisa menjadi situasional bergantung kepada fenomena antar subjek yang berinteraksi menghasilkan sebuah polemik di dalamnya. Keutamaan terhadap pemicu sebuah polemik dalam fenomena hubungan antar negara juga perlu ditelaah lebih jauh. Pada fenomena ini, dasar pemicu dapat dijelaskan melalui ancaman eksistensial negara oleh keberadaan konflik geopolitik LCS yang semakin kompleks sehingga mengharuskan Australia bertindak untuk mengamankan kedaulatannya dengan membangun alutsista negara secara massif. Urgensi akan inovasi alutsista tersebut dilakukan bersama AS dan Inggris melalui AUKUS. Bukan lagi bentuk pelanggaran etika kerjasama antar negara tetapi menjadi adaptif dalam menanggapi ancaman eksistensial negaranya. Kewajiban moral yang harus ditanggung Australia terhadap Prancis dengan memperkuat pendekatan diplomatis serta konsekuensi dalam menanggung denda pembatalan kerjasama kapal selam.

Perhitungan akan dampak konsekuensi yang harus dibayar oleh Australia memuat banyak respon tetapi kewajiban dalam menjaga kedaulatan negaranya merupakan bentuk prioritas dalam waktu dekat. Selanjutnya Australia harus menyelesaikan dampak tindakannya bersama Prancis yang Australia tempuh dengan pembayaran denda hingga pendekatan diplomatis yang dibangun kembali.

Kepentingan Sekuritisasi Australia

Bary Buzzan dan Ole Wæver dalam Copenhagen School melihat sebuah fenomena terancamnya eksistensi aktor dibangun melalui konstruksi oleh sesuatu hal yang menyebabkan aktor tersebut memandangnya menjadi isu keamanan. Pengaplikasian kerangka sekuritisasi yang Australia alami berangkat dari adanya pemicu melalui konstelasi konflik Laut China Selatan sebagai dasar fenomena yang menghasilkan berbagai probabilitas perang terbuka antar kawasan¹⁴. Kebangkitan kekuatan China dalam kawasan justru mengarah terhadap penguatan negara dalam memprioritaskan kedaulatan negaranya. Ketegangan geopolitik mencakup dan berdampak keberbagai sektor hubungan antar negara serta menuai berbagai respon dalam menyikapi konstelasi konflik LCS termasuk Australia. Secara garis besar meninjau konstruksi eksternal yang mulai mengancam eksistensial Australia dalam sektor keamanan yakni adanya konstelasi konflik LCS dengan dominasi China secara determinan hingga dampak yang dibawanya keberbagai sektor dalam hubungan bernegara.

Berdasarkan konstruksi latar belakang adanya konstelasi ketegangan geopolitik yang disebabkan oleh LCS, akhirnya Australia memiliki kepentingan baru untuk lebih memaksimalkan keamanan negaranya demi menjaga stabilitas serta kedaulatan baik secara domestik maupun regional. Secara tidak langsung keberadaan Australia memang tidak se-intens negara-negara yang telah dilalui klaim garis China melalui LCS seperti negara-negara ASEAN, tetapi Australia masih masuk kedalam kawasan Indo-Pasifik. Australia sendiri telah meningkatkan hubungan strategisnya

¹⁴ Buzan and Wæver.

dengan komitmen penuh terhadap sentralitas ASEAN di Asia Tenggara dengan memastikan perdamaian dan keamanan regionalnya¹⁵ sehingga memberikan tanggung jawab yang lebih intens untuk turut serta memberikan perhatian lebih dalam keamanan kawasan.

Secara letak geografis Australia yang berada di Selatan konflik LCS tidak secara langsung bersinggungan dan tidak mengalami dampak secara konkrit dari konstelasi konflik tetapi tetap saja stabilitas kawasan menjadi tujuan utama setiap negara di dunia. Keutamaan jalur perdagangan maritim di kawasan LCS menjadi tinjauan dari aspek geoekonomi, kawasan tersebut merupakan jalur sibuk perdagangan. Kebutuhan Australia dalam segi geoekonomi juga tidak dapat diabaikan begitu saja, dengan mewujudkan kestabilan maritim akan memudahkan pelayaran dan jalur sistem perdagangan¹⁶

Sekuritisasi yang dibangun oleh Australia mencerminkan proses Australia menanggapi konstelasi fenomena tersebut memiliki dampak signifikan akan kebutuhan peningkatan kapasitas militer terutama dalam bidang maritim sebagai isu keamanan tingkat tinggi. Maka, memungkinkan Australia untuk melakukan atau mengambil tindakan yang diluar batas normal dengan mengubah aliansi strategis dan teknologi militernya¹⁷. Pergeseran

kepentingan itu tumbuh berdasarkan upaya dalam membangun sekuritisasi dimana tindakan dan keputusan yang diambil oleh Australia untuk meningkatkan keamanan dan menjaga kedaulatan dalam menghadapi dinamika konstelasi konflik geopolitik dikawasan baik LCS maupun Indo-Pasifik.

Kronologi yang melatar belakangi sekuritisasi Australia menjadi manuver strategis untuk menyeimbangkan kekuatan China dalam kawasan konflik. Australia memastikan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan militer terutama alutsista-nya agar tidak berada diposisi rentan terhadap kendali China yang memiliki pengaruh besar serta potensi-potensi agresi yang akan tumbuh. Ancaman eksistensial regional menumbuhkan pandangan Australia terhadap lingkungan keamanan dikawasan Indo-Pasifik, dominasi keberadaan China dipertimbangkan Australia untuk direspon dengan penguatan alutsista. Dalam hal ini, kapal selam bertenaga nuklir yang disediakan serta menjadi tawaran AUKUS dianggap lebih mampu untuk menghadapi tantangan keamanan ini.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penulisan diatas berfokus pada kepentingan sekuritisasi Australia dalam konteks konflik geopolitik, khususnya terkait dengan dominasi China di kawasan Indo-Pasifik. Australia, dalam upayanya untuk tidak berada dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan potensi agresi China, mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitasnya, khususnya *alutsista* (alat utama sistem

¹⁵ 'ASEAN, Australia Tingkatkan Hubungan Strategis Di Tengah Ketegangan Laut China Selatan — BenarNews Indonesia' <<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/asean-australia-lcs-10272021174815.html>> [accessed 29 November 2023].

¹⁶ Fajar Oktavianto, 'IMPLIKASI AUKUS TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI AUSTRALIA DAN TIONGKOK TAHUN 2021-2022', *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1.2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i2.55>>.

¹⁷ 'Additional University Places to Grow Australia's AUKUS Workforce | Australian

Submarine Agency' <<https://www.asa.gov.au/news/all-news/2023-12-01/additional-university-places-grow-australias-aokus-workforce>> [accessed 5 December 2023].

senjata). Keputusan Australia untuk bergabung dengan AUKUS dan mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir merupakan bagian dari manuver strategis negaranya. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap ancaman eksistensial regional dan percepatan dinamika keamanan di kawasan. Melalui kemitraan AUKUS, Australia berusaha memperkuat kapasitas militernya agar lebih mampu menghadapi tantangan keamanan di lingkungan geopolitik yang semakin kompleks dan kompetitif.

Konsekuensialisme dan sekuritisasi, dalam konteks keputusan Australia terkait perjanjian AUKUS, memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip konsekuensialisme berperan dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional Australia. Keputusan Australia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya melalui kemitraan AUKUS, khususnya dalam pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, merupakan refleksi dari pendekatan konsekuensialistik yang menilai tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan.

Dari perspektif konsekuensialisme, langkah Australia ini didasarkan pada penilaian bahwa manfaat jangka panjang dari peningkatan keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik lebih besar daripada kerugian hubungan dengan Prancis atau potensi dampak negatif lainnya. Keputusan ini mencerminkan penilaian bahwa menghadapi kebangkitan China di kawasan memerlukan respons keamanan yang lebih kuat, dan kapal selam bertenaga nuklir dianggap sebagai alat strategis penting dalam konteks ini.

Proses sekuritisasi, yang dijelaskan dalam kepenulisan, mengacu pada bagaimana isu keamanan dibentuk, diframing, dan dipandang sebagai prioritas

dalam agenda politik. Australia, melalui sekuritisasi kapabilitas militernya, menempatkan isu keamanan ini di atas kepentingan politik lainnya, menunjukkan keadaan darurat dan kebutuhan untuk tindakan yang tidak biasa dalam menghadapi ancaman yang dirasakan. Ini juga menunjukkan bagaimana persepsi ancaman (dalam hal ini, pengaruh meningkat China) dapat mengubah prioritas dan strategi keamanan sebuah negara.

Oleh karena itu, dalam konteks konflik geopolitik yang dihadapi Australia, keputusan untuk bergabung dengan AUKUS dan meningkatkan kemampuannya dalam pertahanan bawah laut mencerminkan aplikasi konsekuensialisme dalam kebijakan luar negeri, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan penilaian tentang hasil yang paling menguntungkan bagi keamanan nasional dan keseimbangan kekuatan regional.

Daftar Pustaka

- 'Additional University Places to Grow Australia's AUKUS Workforce | Australian Submarine Agency' <<https://www.asa.gov.au/news/all-news/2023-12-01/additional-university-places-grow-australias-aucus-workforce>> [accessed 5 December 2023]
- 'ASEAN, Australia Tingkatkan Hubungan Strategis Di Tengah Ketegangan Laut China Selatan — BenarNews Indonesia' <<https://www.benarnews.org/indonesia/berita/asean-australia-lcs-10272021174815.html>> [accessed 29 November 2023]
- 'Australia Announces Compensation Deal with France for Scrapped Submarine Contract' <

- [pacific/20220611-australia-announces-compensation-deal-with-france-over-scrapped-submarine-contract](https://www.cnbci.com/indonesia/2022/06/11/australia-announces-compensation-deal-with-france-over-scrapped-submarine-contract) [accessed 5 December 2023]
- ‘Australia Join AS Di LCS, Dendam Kesumat Apa Ke China?’
[https://www.cnbci.com/news/20220729141434-4-176270/australia-join-as-di-lcs-dendam-kesumat-apa-ke-china](https://www.cnbci.com/indonesia/2022/07/29/141434-4-176270/australia-join-as-di-lcs-dendam-kesumat-apa-ke-china)
 [accessed 5 December 2023]
- Buzan, Barry, and Ole Wæver, ‘Macrosecuritisation and Security Constellations: Reconsidering Scale in Securitisation Theory’, *Review of International Studies*, 35.2 (2009), 253–76
<https://doi.org/10.1017/S0260210509008511>
- Cox, Lloyd, Danny Cooper, and Brendon O’Connor, ‘The AUKUS Umbrella: Australia-US Relations and Strategic Culture in the Shadow of China’s Rise’,
<https://doi.org/10.1177/00207020231195631>, 78.3 (2023), 307–26
<https://doi.org/10.1177/00207020231195631>
- ‘Gedung Putih: AS “Sesalkan” Penarikan Duta Besar Prancis’
<https://www.voaindonesia.com/a/gedung-putih-as-sesalkan-penarikan-duta-besar-prancis/6233773.html>
 [accessed 5 December 2023]
- Hedden, Brian, ‘Consequentialism and Collective Action’, *Ethics*, 130.4 (2020), 530–54
<https://doi.org/10.1086/708535>
- Naeli, Lailatul Mubarakah, ‘KEBIJAKAN AUSTRALIA MEMBELI KAPAL SELAM PERANCIS DALAM PROYEK SEA 1000 : AUSTRALIAN FUTURE SUBMARINES PROGRAM’, 2018
- ‘Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN’, *Jurnal Lemhannas RI*, 9.4 (2021), 25–42
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.414>
- Oktavianto, Fajar, ‘IMPLIKASI AUKUS TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI AUSTRALIA DAN TIONGKOK TAHUN 2021-2022’, *BHUVANA: Journal of Global Studies*, 1.2 (2023)
<https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i2.55>
- Qizilbash, Mozaffar, ‘On “Consequentialism” and the Capability Approach’, *Journal of Human Development and Capabilities*, 23.2 (2022), 161–81
<https://doi.org/10.1080/19452829.2021.1951185>
- Stępką, Maciej, ‘The Copenhagen School and Beyond. A Closer Look at Securitisation Theory’, *IMISCOE Research Series*, 2022, 17–31
https://doi.org/10.1007/978-3-030-93035-6_2/COVER
- Suharman, Yoga, ‘Dilema Keamanan Dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan’, *Intermestic: Journal of International Studies*, 3.2 (2019), 127
<https://doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.3>
- Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha,